



Received: October 03, 2025 | Accepted: November 10, 2025 | Published: December 20, 2025

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBINGKAI KEMISKINAN: KONTESTASI RASIONALITAS MODERN DAN EKONOMI MORAL PADA LITERASI FINANSIAL DI INDONESIA

Zakiyudin Fikri¹, Wahyu Wibowo²

¹Ilmu administrasi negara , Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Institut Pahlawan 12 Sungailiat, Bangka , Indonesia

²Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Email: ¹zakiyudinfikri04@gmail.com, ²wahyuwibowopenulis@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji literasi finansial dalam konteks kemiskinan dengan menyoroti negosiasi antara kebijakan negara dan nilai lokal masyarakat miskin. Literasi finansial sering diposisikan sebagai instrumen teknokratis yang netral untuk meningkatkan kesejahteraan dan inklusi keuangan. Namun, pendekatan tersebut kerap mengabaikan dimensi sosial-budaya, relasi kuasa, serta praktik ekonomi lokal yang membentuk kehidupan masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan kritis literatur (*critical literature review*) terhadap publikasi nasional dan internasional periode 2020–2025, termasuk jurnal terindeks Scopus dan SINTA serta dokumen kebijakan terkait. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi konstruksi literasi finansial dalam kebijakan negara, peran nilai lokal, serta bentuk negosiasi, adaptasi, dan resistensi masyarakat miskin terhadap program literasi finansial. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi finansial memiliki dampak ambivalen: di satu sisi meningkatkan kesadaran dan akses terhadap layanan keuangan formal, namun di sisi lain berpotensi melemahkan solidaritas sosial dan menggeser ekonomi moral berbasis komunitas. Masyarakat miskin tidak bersifat pasif, melainkan menunjukkan agency melalui reinterpretasi praktik ekonomi dan resistensi simbolik terhadap pendekatan individualistik. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan antropologi kebijakan dalam merancang literasi finansial yang sensitif terhadap nilai lokal dan konteks sosial-budaya sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Literasi Finansial, Kemiskinan, Nilai Lokal, Kebijakan Negara, Agency

ABSTRACT

This study examines financial literacy in the context of poverty by focusing on the negotiation between state policies and local values within poor communities. Financial literacy is often positioned as a neutral and technocratic instrument to enhance welfare and financial inclusion. However, such an approach frequently overlooks socio-cultural dimensions, power relations, and local economic practices that shape the lived experiences of poverty. This study employs a qualitative approach through a critical literature review of national and international publications from 2020 to 2025, including Scopus- and SINTA-indexed journals as well as relevant policy documents. The analysis is conducted thematically to explore how financial literacy is constructed within state policies, the role of local values, and the forms of negotiation, adaptation, and resistance exhibited by poor communities toward financial literacy programs. The findings indicate that financial literacy has ambivalent effects: while it can enhance financial awareness and access to formal financial services, it may also weaken social solidarity and transform community-based moral economies. Poor communities are not passive recipients of policy interventions but demonstrate agency through the reinterpretation of

economic practices and symbolic resistance to individualistic approaches. This study highlights the importance of a policy anthropology perspective in designing culturally sensitive and contextually grounded financial literacy policies as part of sustainable poverty alleviation efforts.

Keywords: Financial Literacy, Poverty, Local Values, State Policy, Agency

A. PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan tetap menjadi tantangan struktural yang kompleks di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi yang positif secara makro belum otomatis menghapuskan kemiskinan di lapisan masyarakat paling rentan [1]. Meski indikator makro ekonomi menunjukkan adanya tren pertumbuhan, tingkat kemiskinan yang signifikan masih memengaruhi kehidupan jutaan masyarakat, khususnya di daerah pinggiran dan kelompok rentan [2], [3]. Sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan, negara-negara termasuk Indonesia telah memperkenalkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan literasi finansial sebagai salah satu sarana guna memutus siklus keterbelakangan ekonomi. Konsep ini didukung oleh kajian akademik yang menemukan bahwa literasi finansial dapat memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam mengelola risiko ekonomi dan mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan [4]. Dengan asumsi bahwa peningkatan pengetahuan finansial akan mendorong pengelolaan keuangan yang lebih bijak, kebijakan literasi finansial diposisikan sebagai solusi mengatasi rendahnya kesejahteraan ekonomi dan sebagai kontribusi terhadap inklusi keuangan yang lebih luas [5].

Dalam konteks Indonesia, literasi finansial secara resmi dipromosikan melalui berbagai kebijakan nasional dan program inklusi keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi finansial masyarakat Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih berada pada level yang perlu ditingkatkan secara lebih merata di seluruh lapisan masyarakat [1]. SNLIK mencatat indeks literasi keuangan Indonesia mencapai sekitar 49,68% pada 2022, sedangkan pada tahun 2024 indeks literasi keuangan nasional mencapai 65,43% dan indeks inklusi keuangan 75,02% [6]. Artinya meningkat dari angka sebelumnya tetapi masih menunjukkan gap signifikan antara literasi finansial dan inklusi keuangan secara umum [7]. Meski meningkat, capaian ini tetap memperlihatkan ruang persoalan terutama kesenjangan antarwilayah/kelompok sosial yang menuntut pembacaan lebih sosial-budaya, bukan semata teknis-individual

Namun, pendekatan literasi finansial sebagai alat pengentasan kemiskinan seringkali dibingkai dalam istilah yang teknokratis, yakni dengan mengukur tingkat pengetahuan dan keterampilan individu dalam pengelolaan keuangan, tanpa mempertimbangkan secara memadai konteks sosial dan budaya masyarakat yang menjadi target kebijakan tersebut sebagai sebuah tantangan yang teridentifikasi dalam ulasan sistematis literatur literasi keuangan yang menekankan perlunya program yang disesuaikan dengan berbagai konteks sosial agar efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan inklusi sosial [8].

Lebih jauh, kebijakan literasi finansial dapat dibaca sebagai upaya standardisasi perilaku ekonomi: negara dan institusi keuangan memproduksi ‘panduan hidup finansial’ yang mendorong warga menginternalisasi etika

pengelolaan diri (*self-management*), disiplin anggaran, dan kalkulasi risiko sebagai ukuran kewargaan yang baik. Dalam kerangka ini, kemiskinan berisiko direduksi menjadi problem kekurangan kapasitas individu, sementara relasi kuasa, ketimpangan kesempatan, dan perlindungan sosial yang timpang menjadi latar yang diredam. Literatur kritis tentang *everyday financialisation* menunjukkan bahwa logika ‘tanggung jawab personal’ dalam edukasi/literasi finansial sering berfungsi sebagai mekanisme *governmentality* yang memindahkan beban risiko dari struktur ke pundak individu terutama kelompok berpendapatan rendah yang justru paling rentan terhadap utang dan ketidakpastian ekonomi [9], [10], [11].

Paradigma literasi finansial yang dominan cenderung berangkat dari asumsi bahwa ketidakberdayaan ekonomi masyarakat miskin terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan individu dalam mengambil keputusan finansial yang rasional, sehingga solusinya lebih banyak berupa penyediaan bahan edukasi dan informasi teknis semata [12]. Padahal, kritik terhadap pendekatan deficit-based ini menunjukkan bahwa pendekatan semacam itu bisa mengabaikan realitas sosial, budaya, dan struktural yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan literasi tersebut secara kontekstual [9].

Dalam literatur ekonomi dan kebijakan pembangunan, literasi finansial memang sering dipahami sebagai komponen penting dalam mencapai inklusi keuangan dan pengurangan kemiskinan, dengan sejumlah penelitian yang menunjukkan hubungan positif antara pengetahuan finansial dengan perilaku finansial yang lebih sehat dan akses ke layanan keuangan [14]. Namun demikian, studi-studi terbaru juga menegaskan bahwa pemahaman tentang literasi finansial yang hanya menekankan aspek pengetahuan teknis tanpa memperhatikan konteks sosial budaya bisa gagal mencerminkan bagaimana masyarakat miskin sebenarnya mengevaluasi, mengelola, dan menafsirkan keputusan finansial dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika faktor budaya, norma sosial, dan struktur ekonomi berperan kuat dalam praktik ekonomi lokal [7], [11], [12], [13]. Karena itu, semakin banyak kajian yang menekankan perlunya pendekatan literasi finansial yang lebih holistik dan kontekstual, yang tidak hanya mentransfer pengetahuan teknis, tetapi juga mengintegrasikan dinamika sosial, nilai budaya, dan realitas ekonomi masyarakat sebagai bagian dari desain kebijakan dan program literasi [13].

Pendekatan semacam ini sering mengasumsikan bahwa individu miskin akan otomatis “menjadi makmur” setelah menerima edukasi finansial, sementara isu struktural seperti akses yang tidak setara terhadap layanan keuangan, ketidakamanan pekerjaan, serta harapan sosial dan budaya yang melingkupi praktik ekonomi masyarakat miskin tidak mendapat penjelasan yang memadai dalam wacana tersebut. [14] menunjukkan bahwa literasi keuangan adalah praktik yang termasuk penggunaan bahasa, adaptasi budaya, dan komunikasi keuangan dalam konteks sosial masyarakat.

Ketidakseimbangan penekanan ini juga tercermin dalam banyak kajian empiris yang lebih fokus pada indikator statistik literasi atau efektivitas program, tetapi kurang menelaah bagaimana literasi finansial dipahami dan dinegosiasikan secara sosial–budaya di tingkat komunitas. Misalnya, penelitian di pedesaan menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan masyarakat pedesaan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, tetapi juga keterbatasan akses informasi, pendidikan, dan pola pikir tradisional yang dipengaruhi budaya lokal [19].

Dalam tradisi sosiologi pedesaan Indonesia, pembacaan kemiskinan sejak awal tidak pernah murni individualistik. Geertz, misalnya, menekankan bagaimana kemiskinan dan strategi bertahan hidup teranyam dalam struktur sosial pedesaan, relasi kerja, serta mekanisme berbagi yang menjaga kohesi. Garis debat ini berkelindan dengan gagasan ekonomi moral yang melihat keputusan ekonomi sebagai tindakan yang selalu bermuatan kewajiban sosial, norma resiprositas, dan legitimasi moral komunitas. Studi-studi mutakhir juga memperlihatkan bahwa jaringan informal (dukungan kekerabatan, skema gotong royong, praktik simpan-pinjam komunitas/ROSCA) bukan sekadar sisa tradisi, melainkan perangkat proteksi dan negosiasi yang hidup berdampingan dengan program formal negara [10], [11], [20]. Namun, masih terbatas kajian yang secara eksplisit mempertemukan warisan sosiologi pedesaan tersebut dengan kritik atas kebijakan literasi finansial sebagai proyek pembentukan subjek rasional modern. Di titik inilah artikel ini memposisikan kontribusinya: membaca kebijakan literasi finansial sebagai arena kontestasi rasionalitas modern dan ekonomi moral dalam pembingkaian kemiskinan di Indonesia.

Dalam kajian antropologi dan sosiologi, fenomena ini sering dipahami sebagai sebuah arena negosiasi nilai-nilai sosial lokal dan wacana kebijakan negara. Alih-alih sekadar mengadopsi aturan perilaku finansial yang digariskan oleh kebijakan nasional, masyarakat miskin seringkali menafsirkan, beradaptasi, atau bahkan menolak implementasi literasi finansial berdasarkan nilai-nilai, praktik budaya, dan struktur sosial yang ada dalam komunitas mereka sendiri. Misalnya, penelitian tentang literasi keuangan dalam konteks pendidikan menyatakan bahwa literasi harus disesuaikan dengan konteks sosial budaya agar benar-benar efektif [15].

Masyarakat juga tidak hidup dalam ruang hampa kelembagaan; konteks sosial seperti norma berbagi sumber daya, batasan budaya dalam berbicara tentang uang, dan peran hubungan kekerabatan memengaruhi bagaimana keputusan finansial diambil dalam kehidupan sehari-hari. Studi [16] menemukan bahwa akses informasi terkait literasi keuangan sering terhambat karena masyarakat kesulitan memahami materi yang tidak disesuaikan dengan pengalaman hidup mereka. Dengan demikian, sistem hubungan kekerabatan, solidaritas kolektif, dan tata nilai moral yang menempatkan keluarga sebagai unit ekonomi bersama merupakan bagian penting dari praktik ekonomi masyarakat miskin yang sukar diukur hanya dengan indeks literasi finansial semata. Dengan kata lain, sebagian orang tidak hanya perlu “pengetahuan teknis”, tetapi juga konteks sosial budaya untuk mengintegrasikan wawasan tersebut ke dalam praktik berpikir mereka sendiri.

Pendekatan antropologis menekankan bahwa praktik finansial masyarakat miskin perlu dipahami sebagai produk dari relasi sosial dan nilai kultural, bukan semata-mata sebagai hasil pemahaman individu terhadap konsep ekonomi modern [22]. Dalam perspektif ini, literasi finansial dipahami sebagai titik temu yang sekaligus ruang negosiasi antara kebijakan negara yang merepresentasikan wacana modernitas ekonomi dan nilai-nilai lokal yang berakar dalam kehidupan sosial masyarakat [23]. Ruang negosiasi tersebut menunjukkan bahwa nilai lokal memainkan peran signifikan dalam menafsirkan dan mereproduksi praktik finansial yang bermakna secara sosial, misalnya dalam pengambilan keputusan mengenai utang, tabungan, pinjaman berbasis komunitas, dan pengelolaan modal usaha kecil.

Namun demikian, meskipun pendekatan antropologi menawarkan wawasan penting tentang bagaimana praktik ekonomi lokal berinteraksi dengan kebijakan literasi finansial, kajian semacam ini masih relatif terbatas dalam literatur Indonesia sampai saat ini. Sebagian besar studi masih berfokus pada aspek pengukuran dan evaluatif semata, sedangkan analisis yang mengintegrasikan konteks nilai lokal dan struktur sosial budaya dalam praktik literasi keuangan belum berkembang secara memadai [24]. Padahal, tanpa pemahaman yang komprehensif tentang dinamika sosial–budaya ini, kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan literasi finansial berpotensi gagal mencapai tujuan pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan, karena kebijakan formal saja tidak serta-merta mengubah praktik ekonomi yang telah terinternalisasi dalam nilai, norma, dan struktur sosial komunitas. Hal ini terutama terasa di pedesaan dan komunitas tradisional, di mana *nilai budaya lokal* dan cara masyarakat mengelola hubungan sosial sering menentukan bagaimana praktik finansial dijalankan sehari-hari [25].

Artikel ini mengisi celah kajian melalui tinjauan kritis literatur tentang literasi finansial, kemiskinan, dan nilai lokal dalam kebijakan negara. Dengan menelaah temuan dan asumsi kebijakan, artikel ini menawarkan pemahaman holistik tentang bagaimana literasi finansial diproduksi, dipraktikkan, dan dinegosiasikan, serta menegaskan pentingnya dimensi sosial-budaya dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tinjauan kritis literatur (*critical literature review*) untuk menganalisis hubungan antara nilai lokal, kebijakan negara, literasi finansial, dan kemiskinan. Pendekatan *critical literature review* dipilih karena tidak hanya bertujuan merangkum temuan penelitian sebelumnya, tetapi juga memungkinkan analisis kritis terhadap asumsi, kerangka konseptual, serta relasi kuasa yang membentuk wacana kebijakan literasi finansial dan praktik ekonomi masyarakat miskin [26]. Dalam tradisi penelitian kualitatif, realitas sosial dipahami sebagai sesuatu yang dibangun secara sosial dan sarat makna, sehingga analisis diarahkan pada proses penafsiran dan konteks sosial-budaya [27]; karena itu literasi finansial diposisikan sebagai fenomena sosial-budaya yang melekat pada struktur sosial dan praktik keseharian, bukan semata persoalan teknis pengelolaan uang. Kerangka dasar metode ini melanjutkan rancangan sebelumnya yang menempatkan literasi finansial sebagai arena negosiasi sosial-budaya dan memprioritaskan publikasi 2020–2025.

Penelusuran literatur dilakukan bertahap melalui Google Scholar, Lens.org, serta portal jurnal nasional (SINTA/GARUDA), dan penelusuran terarah pada artikel dari jurnal terindeks Scopus. Kata kunci disusun dalam Bahasa Indonesia dan Inggris dengan operator Boolean, seperti: (“literasi finansial” OR “literasi keuangan” OR “financial literacy”) AND (“kemiskinan” OR “poverty”) AND (“kebijakan” OR “policy” OR “governmentality”). Untuk memperkuat dimensi sosiologis–antropologis, pencarian ditambah istilah seperti (“nilai lokal” OR “local values” OR “cultural context”) dan (“ekonomi moral” OR “moral economy” OR “informal finance”). Penelusuran difokuskan pada publikasi 2020–2025 guna menangkap perkembangan terkini, dengan penggunaan selektif literatur klasik sebagai landasan konseptual. Seluruh hasil kemudian disaring untuk memastikan relevansi dengan fokus kajian.

Literatur diinklusi apabila memenuhi kriteria: (1) terbit pada 2020–2025 (kecuali karya klasik/konseptual yang menjadi rujukan teori); (2) membahas literasi finansial/inklusi keuangan dalam relasinya dengan kemiskinan, kebijakan publik, praktik ekonomi masyarakat, dan/atau konteks sosial-budaya; (3) berupa artikel jurnal bereputasi (terindeks Scopus) atau jurnal nasional terakreditasi (SINTA), buku akademik, dan dokumen kebijakan resmi terkait literasi finansial/kemiskinan; (4) tersedia teks lengkap sehingga dapat dianalisis secara kritis. Literatur dieksklusi apabila: (a) duplikat, (b) tidak relevan dengan fokus (misalnya hanya membahas kinerja keuangan/produk finansial tanpa dimensi kemiskinan-kebijakan-konteks sosial), (c) berupa opini populer tanpa basis akademik yang memadai, atau (d) tidak menyediakan informasi metodologis/argumentatif yang cukup untuk dinilai secara kritis.

Analisis dilakukan secara tematik–interpretatif melalui tahapan: (1) pembacaan dekat (close reading) untuk mengidentifikasi cara literasi finansial didefinisikan, tujuan kebijakan, dan asumsi tentang kemiskinan; (2) pengodean tema (misalnya: rasionalitas modern, responsibilisasi individu, ekonomi moral, solidaritas/jejaring sosial, serta resistensi/negosiasi praktik lokal); (3) perbandingan lintas-sumber untuk menemukan pola dominan, ketegangan (dialektika) antarwacana, serta celah konseptual; dan (4) sintesis kritis untuk merumuskan bagaimana literasi finansial bekerja sebagai arena kontestasi antara rasionalitas teknokratis negara dan praktik ekonomi moral masyarakat. Dengan prosedur ini, kajian tidak hanya menyajikan ringkasan penelitian terdahulu, tetapi membangun argumen analitis mengenai produksi pengetahuan kebijakan dan implikasinya terhadap cara kemiskinan dibingkai serta diintervensi dalam konteks Indonesia [26].

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi finansial perlu dipahami sebagai instrumen negara dalam wacana pembangunan yang membentuk rasionalitas ekonomi, relasi kuasa, dan cara pandang terhadap kemiskinan.

Literasi Finansial sebagai Wacana dan Instrumen Negara

Dalam berbagai kebijakan pembangunan kontemporer, literasi finansial semakin diposisikan sebagai salah satu instrumen utama negara dalam mengelola persoalan kemiskinan. Literasi finansial tidak lagi dipahami sekadar sebagai pengetahuan teknis mengenai pengelolaan keuangan, melainkan sebagai perangkat normatif yang diharapkan mampu membentuk subjek ekonomi yang rasional, mandiri, dan bertanggung jawab. Melalui berbagai program edukasi keuangan, negara mendorong masyarakat terutama kelompok miskin untuk menyesuaikan perilaku ekonominya dengan standar rasionalitas pasar dan logika manajemen keuangan modern. Dalam kerangka ini, literasi finansial berfungsi sebagai bagian dari proyek pembangunan nasional yang menuntut kesejahteraan individu dengan kemampuan mengelola risiko dan keputusan finansial secara personal [12], [28].

Sejumlah literatur menunjukkan bahwa kebijakan literasi finansial diproduksi dan disebarluaskan melalui bahasa rasionalitas ekonomi yang menekankan efisiensi, perencanaan, dan kontrol diri [24], [25], [26]. Negara, melalui institusi keuangan dan regulasi publik, membungkai literasi finansial sebagai prasyarat bagi inklusi keuangan dan mobilitas sosial. Dalam narasi ini, individu miskin dipandang sebagai subjek yang belum “cukup cakap” secara finansial, sehingga membutuhkan intervensi berupa edukasi agar mampu

mengelola pendapatan, utang, dan konsumsi secara lebih disiplin. Pendekatan semacam ini dapat ditemukan dalam berbagai dokumen kebijakan dan kajian ekonomi pembangunan yang menempatkan literasi finansial sebagai solusi preventif terhadap kemiskinan dan kerentanan ekonomi [28].

Namun, pembingkaian literasi finansial sebagai tanggung jawab individu secara implisit mereduksi kemiskinan menjadi persoalan pengetahuan dan perilaku finansial semata. Dalam banyak kebijakan, kemiskinan dipahami sebagai akibat dari keputusan ekonomi yang tidak rasional, kurangnya perencanaan, atau ketidakmampuan mengelola keuangan rumah tangga. Perspektif ini cenderung mengabaikan faktor-faktor struktural seperti ketimpangan akses terhadap sumber daya, ketidakstabilan pasar kerja, relasi kuasa dalam sistem ekonomi, serta keterbatasan perlindungan sosial. Sejumlah informasi menunjukkan bahwa pendekatan ini berpotensi menormalisasi kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan warganya, dengan mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada individu miskin sebagai subjek yang dianggap “belum literat” secara finansial [32], [33], [34].

Dari perspektif antropologi kebijakan, literasi finansial dapat dibaca sebagai bagian dari praktik *governmentality*, yakni cara negara membentuk perilaku warga melalui produksi pengetahuan dan norma tertentu. Konsep ini menyoroti bagaimana kebijakan tidak hanya bekerja melalui regulasi formal, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai tertentu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks literasi finansial, negara tidak secara langsung memaksa, melainkan membimbing individu untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan logika ekonomi yang dianggap ideal. Dengan demikian, literasi finansial berfungsi sebagai mekanisme pendisiplinan ekonomi yang halus, di mana pengelolaan kemiskinan dilakukan melalui pembentukan subjek yang patuh terhadap rasionalitas pasar.

Literasi finansial juga berperan sebagai alat klasifikasi moral terhadap kelompok miskin. Individu yang gagal keluar dari kemiskinan kerap diposisikan sebagai kurang disiplin, tidak rasional, atau tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Dalam konteks ini, literasi finansial tidak hanya mengatur praktik ekonomi, tetapi juga membentuk stigma sosial dan hierarki moral baru antara mereka yang dianggap “melek finansial” dan mereka yang “belum melek”. Beberapa kajian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan ini berpotensi memperdalam eksklusi sosial, karena kegagalan ekonomi dipersonalisasi dan dilepaskan dari konteks struktural yang lebih luas [35], [36], [37], [38].

Dengan demikian, literasi finansial tidak hadir sebagai praktik yang netral atau semata-mata teknis, melainkan sebagai wacana pembangunan yang sarat dengan relasi kuasa antara negara dan kelompok miskin. Melalui kebijakan literasi finansial, negara mendefinisikan apa yang dianggap sebagai perilaku ekonomi yang “benar” dan “bertanggung jawab”, sekaligus membingkai kemiskinan sebagai persoalan individual yang dapat diperbaiki melalui perubahan perilaku. Pemahaman kritis terhadap literasi finansial sebagai instrumen negara menjadi penting untuk membuka ruang analisis yang lebih sensitif terhadap dinamika sosial-budaya dan ketimpangan struktural yang membentuk pengalaman kemiskinan di masyarakat.

Kemiskinan, Nilai Lokal, dan Ekonomi Moral Masyarakat

Pemahaman kemiskinan dalam literatur sosiologi dan antropologi telah bergerak melampaui definisi semata-mata sebagai kekurangan ekonomi. Kemiskinan juga dipahami sebagai pengalaman sosial-budaya yang membentuk

praktik kehidupan sehari-hari, relasi sosial, dan norma moral dalam komunitas [39]. Dari perspektif ini, masyarakat miskin tidak hanya dihadapkan pada keterbatasan finansial, tetapi juga pada tuntutan sosial dan kewajiban moral yang memengaruhi bagaimana mereka mengelola sumber daya yang tersedia [40], [41], [42]. Dalam konteks ini, praktik ekonomi sehari-hari, termasuk tabungan, pinjaman, dan manajemen risiko, sering kali dipandu oleh nilai-nilai kolektif dan logika sosial yang berbeda dari prinsip rasionalitas ekonomi modern.

Literatur terkini menunjukkan bahwa praktik ekonomi masyarakat miskin sangat dipengaruhi oleh solidaritas sosial, kewajiban moral, nilai religius, dan relasi kekerabatan [43], [44], [45]. Misalnya, utang atau pinjaman bukan sekadar transaksi finansial, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat hubungan sosial dan memenuhi tanggung jawab moral terhadap keluarga atau komunitas. Menabung atau mengelola aset pun sering dilakukan bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi sebagai bentuk keamanan kolektif, di mana risiko dibagi bersama dalam jaringan sosial [46]. Pendekatan ini menekankan ekonomi moral, yaitu logika ekonomi yang diinternalisasi melalui nilai-nilai sosial dan budaya lokal.

Program literasi finansial yang menekankan tanggung jawab individu, perencanaan keuangan rasional, atau investasi formal sering tidak selaras dengan praktik sosial di komunitas miskin. Sebagai contoh, masyarakat yang menolak instruksi menabung secara formal mungkin melakukannya bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena menabung di lembaga formal tidak sejalan dengan praktik berbagi risiko atau solidaritas kekerabatan yang telah lama diterapkan. Hal ini menimbulkan konflik nilai antara pendekatan teknokratis literasi finansial dan nilai-nilai lokal yang bersifat kolektif.

Literatur mutakhir menegaskan bahwa agama dan spiritualitas berperan penting dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat miskin. Nilai religius memengaruhi cara individu memaknai utang, sedekah, dan distribusi keuntungan, sehingga keputusan finansial tidak semata didasarkan pada rasionalitas individual, tetapi juga pada kewajiban moral dan spiritual. Dalam konteks ini, pendekatan literasi finansial yang berorientasi individual berpotensi menimbulkan disonansi kultural ketika mengabaikan dimensi religius, sebagaimana terlihat pada program edukasi keuangan berbasis bunga yang tidak selalu sejalan dengan prinsip syariah. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan adaptasi atau resistensi sebagai respons yang rasional secara sosial-budaya.

Di luar konflik nilai, masyarakat miskin juga mengembangkan praktik ekonomi kolektif sebagai strategi adaptif yang jarang tercatat dalam literatur teknokratis. Mekanisme informal seperti arisan, koperasi komunitas, dan gotong royong finansial berfungsi sebagai sistem perlindungan sosial internal yang memungkinkan redistribusi risiko sekaligus memperkuat kohesi dan identitas komunitas. Praktik ekonomi moral di Nusantara dapat dibaca sebagai bentuk literasi finansial lokal yang bekerja melalui norma sosial, kepercayaan, dan mekanisme saling-menolong, bukan semata kalkulasi untung-rugi individual. Berbeda dari logika perbankan formal yang menuntut kelayakan administratif, praktik seperti arisan, lumbung desa, atau pinjaman kekerabatan mengandalkan modal sosial dan kewajiban moral sebagai jaminan, sehingga lebih kompatibel dengan struktur kehidupan komunitas.

Literatur mutakhir juga menunjukkan bahwa mekanisme informal semacam ini tetap relevan sebagai pelindung sosial (*informal social protection*) terutama ketika perlindungan formal tidak menjangkau kelompok paling rentan; karenanya, program literasi finansial yang sensitif budaya semestinya tidak menghapus mekanisme lokal, tetapi memetakan, mengakui, dan mengintegrasikannya sebagai bagian dari desain kebijakan [20], [47]. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan pengalaman sosial-budaya yang dilembagakan dalam relasi sosial, kewajiban moral, dan norma lokal. Oleh karena itu, kebijakan literasi finansial perlu melampaui pendekatan individualistik dengan mengakui ekonomi moral kolektif, agar lebih inklusif, adaptif, dan kontekstual terhadap dinamika kehidupan masyarakat miskin.

Negosiasi, Adaptasi, dan Resistensi terhadap Kebijakan Negara

Masyarakat miskin tidak sekadar menjadi objek pasif dari kebijakan negara, tetapi menunjukkan agency dalam menghadapi dan menanggapi intervensi kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pendekatan sosiologi-antropologi kebijakan menggarisbawahi bahwa masyarakat berperan aktif dalam menafsirkan, menyesuaikan, atau bahkan menolak kebijakan yang masuk ke dalam realitas sosial mereka. Dalam kajian kebijakan sosial, negosiasi ini dipahami sebagai proses di mana individu dan komunitas bertindak untuk menegosiasikan akses, adaptasi, atau reaksi terhadap struktur kebijakan yang lebih besar, sehingga praktik kehidupan sehari-hari turut membentuk hasil kebijakan itu sendiri, bukan hanya menerima dampaknya secara linear. Dalam konteks literasi finansial, hal ini berarti masyarakat miskin dapat menghadapi kebijakan literasi finansial melalui perubahan makna dan praktik di level lokal sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri [48].

Selain adaptasi, muncul pula bentuk resistensi terhadap kebijakan negara yang bersifat simbolik atau tersirat dalam praktik sehari-hari. Dalam kajian resistensi sosial, resistensi tidak hanya berupa penolakan terbuka, tetapi dapat juga tampak melalui tindakan-tindakan halus, seperti kepatuhan formal terhadap aturan disertai pemeliharaan praktik lokal yang berbeda secara substantif. Konsep *everyday resistance* menekankan bagaimana masyarakat yang berada dalam posisi subordinat menggunakan strategi non-konfrontatif untuk mempertahankan nilai-nilai dan praktik sosialnya, sekaligus menegosiasikan relasi kekuasaan dengan struktur yang lebih dominan. Pendekatan ini membuka pemahaman bahwa resistensi dapat muncul sebagai bentuk tindakan yang tidak selalu terekspresikan secara langsung, namun tetap signifikan dalam mempertahankan identitas dan cara hidup komunitas mereka [49].

Negosiasi, adaptasi, dan resistensi ini terjadi pada berbagai level sosial mulai dari rumah tangga hingga komunitas yang menggambarkan bahwa kebijakan negara tidak pernah sampai kepada masyarakat dalam bentuk yang seragam atau tetap. Kebijakan yang dirancang di level makro pun biasanya mengalami transformasi makna dan praktik saat berinteraksi dengan konteks lokal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin memiliki kapasitas untuk merespon kebijakan dengan cara yang merefleksikan nilai-nilai budaya, solidaritas sosial, serta strategi bertahan hidup kolektif yang mereka miliki. Dengan demikian, literasi finansial ketika dipraktekkan di lapangan sering kali bukan sekadar penerapan pengetahuan teknis, tetapi merupakan arena negosiasi sosial-budaya di mana nilai-nilai lokal dan kepentingan kebijakan saling bersinggungan dan berdinamika secara terus-menerus.

Literasi Finansial dalam Dinamika Perubahan Sosial dan Budaya

Literasi finansial sering dipandang sebagai instrumen pembangunan yang mampu membuka akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang lebih luas, seperti tabungan bank, kredit mikro, atau proteksi finansial lainnya. Menurut tinjauan sistematik terbaru, peningkatan literasi finansial secara signifikan berkaitan dengan peningkatan inklusi sosial dan ekonomi serta pengurangan ketidaksetaraan dalam berbagai konteks masyarakat global, karena literasi membantu individu memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan produk serta layanan finansial secara lebih efektif. Literatur menyatakan bahwa kombinasi literasi dan inklusi finansial memperkuat kapasitas individu dalam menghadapi perubahan ekonomi, meningkatkan peluang partisipasi dalam pasar formal, dan memungkinkan perencanaan jangka panjang untuk keluarga maupun usaha mikro [8].

Namun, dalam konteks digitalisasi, perlu dicatat munculnya risiko kemiskinan baru ketika pinjaman online dan fintech lending masuk ke rumah tangga rentan melalui narasi inklusi dan literasi keuangan. Dalam praktiknya, kondisi ini dapat memicu kelebihan beban utang, relasi kuasa baru dalam penagihan, serta kerentanan privasi data. Di Indonesia layanan pinjaman digital yang berkembang lebih cepat daripada kapasitas perlindungan konsumen, sehingga beban risiko cenderung dipindahkan kepada peminjam. Secara lebih luas, riset internasional juga mengingatkan bahwa keuangan digital dapat bergeser dari instrumen inklusi menjadi perangkap utang ketika akses kredit instan tidak disertai pengendalian risiko, transparansi biaya, dan dukungan institusional [50]. Karena itu, literasi finansial tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan mengelola uang, tetapi juga sebagai literasi kritis yang mampu membaca struktur platform, kontrak digital, dan ketimpangan informasi dalam ekosistem pinjaman.

Dampak positif literasi finansial juga tercermin pada kesadaran pengelolaan keuangan yang lebih baik. Ketika individu memahami prinsip dasar seperti budgeting, manajemen utang, atau investasi sederhana, mereka cenderung membuat keputusan finansial yang lebih bijak dan terencana. Temuan ini terlihat di sejumlah studi empiris yang menunjukkan bahwa literasi finansial berimplikasi pada perilaku menabung yang lebih konsisten, peningkatan penggunaan layanan kredit yang formal, serta perencanaan keuangan jangka panjang yang lebih matang [26], [32], [38], [40].

Namun, literasi finansial juga menghasilkan dampak yang bersifat ambivalen secara sosial-budaya. Di satu sisi, akses yang lebih besar terhadap mekanisme finansial formal dapat memperluas peluang ekonomi bagi individu dan komunitas. Di sisi lain, penekanan pada pengelolaan risiko individual dan perencanaan finansial personal sering kali berpotensi melemahkan solidaritas sosial tradisional, karena tanggung jawab finansial semakin dipasarkan sebagai urusan personal daripada kolektif. Ketika budaya gotong royong atau tabungan kolektif dikontraskan dengan logika tabungan individual di bank atau lembaga formal, praktik kolektif dapat mengalami marginalisasi atau bahkan dianggap kurang “rasional” menurut standar pasar modern [8].

Dalam konteks budaya yang beragam, dampak literasi finansial terhadap perilaku ekonomi tidak selalu bersifat linier. Integrasi literasi finansial kerap memicu redefinisi relasi sosial, di mana praktik ekonomi berbasis solidaritas komunitas berhadapan dengan logika tanggung jawab finansial individual.

Proses ini dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok yang mampu menyesuaikan diri dengan sistem formal dan mereka yang tetap bergantung pada nilai kolektif. Selain itu, literasi finansial tidak hanya membuka akses, tetapi juga berpotensi menciptakan eksklusi baru ketika keterampilan, bahasa, dan teknologi menjadi prasyarat partisipasi. Oleh karena itu, kebijakan literasi finansial perlu mengakui nilai lokal dan menjaga kohesi sosial agar pemberdayaan ekonomi tidak mengikis relasi komunitas.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa literasi finansial tidak bersifat netral dalam pengelolaan kemiskinan, melainkan memuat relasi kuasa antara negara dan masyarakat miskin yang membentuk norma, perilaku, dan praktik ekonomi sesuai logika pembangunan modern. Oleh karena itu, keberhasilan program literasi finansial tidak dapat diukur semata dari peningkatan pengetahuan individu, tetapi harus dipahami dalam kaitannya dengan pengakuan terhadap nilai lokal, solidaritas sosial, dan ekonomi moral yang kerap berbeda dari rasionalitas teknokratis negara.

Secara teoretis, artikel ini menegaskan pentingnya perspektif antropologi kebijakan dalam membaca literasi finansial sebagai arena negosiasi antara nilai lokal dan tujuan pembangunan. Secara praktis, temuan ini merekomendasikan perancangan kebijakan literasi finansial yang sensitif budaya, partisipatif, dan kontekstual, dengan mengintegrasikan mekanisme kolektif dan praktik komunitas. Pendekatan tersebut memungkinkan literasi finansial berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang inklusif, memperkuat kohesi sosial, serta mengurangi risiko eksklusi sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] OJK, “Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022.” [Online]. Available: <https://ojk.go.id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx>
- [2] L. A. Gunawan, I. Pulungan, and F. M. Malik, “The Impact of GDP, Investment, and Inflation on Poverty in ASEAN-8 Countries: A Panel Data Analysis (2010–2023),” *Journal of Islamic Financial Technology*, vol. 4, no. 2, pp. 1–10, Nov. 2025, doi: 10.24952/JIFTECH.V4I2.17915.
- [3] T. Guindo, M. B. Hak, and F. Tan, “Breakthrough Policies and the Vicious Circle of Poverty: A Case Study of Indonesia,” *Frontiers in Business and Economics*, vol. 4, no. 1, pp. 1–9, Apr. 2025, doi: 10.56225/FINBE.V4I1.410.
- [4] M. W. Askar, B. Ouattara, and Y.-F. Zhang, “Financial Literacy and Poverty Reduction: The Case of Indonesia,” Mar. 19, 2020. Accessed: Dec. 15, 2025. [Online]. Available: <https://www.adb.org/publications/financial-literacy-poverty-reduction-case-indonesia>
- [5] OJK, “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025.” [Online]. Available: <https://ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>

- [6] OJK, "Joint Press Release: OJK And Statistics Indonesia Present National Survey On Financial Literacy And Inclusion 2024 Findings." [Online]. Available: <https://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-And-Statistics-Indonesia-Present-National-Survey-On-Financial-Literacy-And-Inclusion-2024-Findings.aspx>
- [7] L. Retnosari, "Pentingnya Literasi Keuangan untuk Mengurangi Kemiskinan." [Online]. Available: <https://www.antaranews.com/berita/4165092/pentingnya-literasi-keuangan-untuk-mengurangi-kemiskinan>
- [8] M. de los Á. Hidalgo-Mayorga, M. I. Puente-Riofrio, F. P. Pérez-Salas, K. G. Guerrero-Arrieta, and A. L. López-Naranjo, "Financial Literacy as a Tool for Social Inclusion and Reduction of Inequalities: A Systematic Review," *Soc Sci*, vol. 14, no. 11, Nov. 2025, doi: 10.3390/SOCSCI14110658/S1.
- [9] T. Balliester Reis and V. M. Kamau, "Are Low-Income Workers Financially Irresponsible? Analysing Financial Literacy and Over-Indebtedness in Nairobi," *Critical Perspectives on Accounting*, vol. 102, p. 102823, Dec. 2025, doi: 10.1016/J.CPA.2025.102823.
- [10] C. Gilbert, "Debt, Accounting, and the Transformation of Individuals into Financially Responsible Neoliberal Subjects," *Critical Perspectives on Accounting*, vol. 77, Jun. 2021, doi: 10.1016/J.CPA.2020.102186.
- [11] A. Angsten Clark, S. Davies, R. Owen, and K. Williams, "Beyond Individual Responsibility – Towards a Relational Understanding of Financial Resilience Through Participatory Research and Design," *J Soc Policy*, vol. 54, no. 4, pp. 1225–1242, Oct. 2025, doi: 10.1017/S0047279423000685.
- [12] OECD, "Financial Education." [Online]. Available: <https://www.oecd.org/en/topics/financial-education.html>
- [13] N. D. Harris and D. N. Burrell, "Supporting a Culturally Responsive Approach to Financial Literacy," 2025, doi: 10.5281/ZENODO.16218628.
- [14] I. Katnic *et al.*, "Understanding the Role of Financial Literacy in Enhancing Economic Stability and Resilience in Montenegro: A Data-Driven Approach," *Sustainability* 2024, Vol. 16, vol. 16, no. 24, Dec. 2024, doi: 10.3390/SU162411065.
- [15] N. Fadila, S. N. Azizah, N. Ayu, F. Wanda, and B. Kurniawan, "Integrasi Literasi Keuangan dalam Pembelajaran Ekonomi: Strategi dan Dampaknya terhadap Pengambilan Keputusan Finansial," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 9, no. 7, pp. 21–30, Jun. 2025, doi: 10.9963/N2NCGF28.
- [16] S. Irdiana, N. Lukiana, and K. T. Kasim, "Implications of Financial Literacy, Lifestyle, and Social Factors on Student Financial Behavior," *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, vol. 8, no. 2, pp. 111–117, Jun. 2024, doi: 10.30741/ASSETS.V8I2.1320.
- [17] D. N. L. Asih, V. Andrianingsih, and Moh. Faisol, "The Impact of Financial Literacy, Financial Technology, Social Environment, and Lifestyle on Financial Management," *Jurnal Akademi Akuntansi*, vol. 8, no. 2, pp. 314–324, Jun. 2025, doi: 10.22219/JAA.V8I2.37454.
- [18] V. Widiyasningrum and A. Antoni, "Peran Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga." Accessed: Dec. 15, 2025. [Online]. Available: <https://jurnal.uwp.ac.id/feb/index.php/jeps/article/view/595>

- [19] K. F. Ariani, T. I. Rahmawati, and D. V. Anggraini, “Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Pedesaan Guna Mendorong Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia Perspektif Hukum Perbankan,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, vol. 1, no. 6, pp. 118–128, Nov. 2024, doi: 10.61722/JMIA.V1I6.2874.
- [20] A. F. Zambrano, L. F. Giraldo, M. T. Perdomo, I. D. Hernández, and J. M. Godoy, “Rotating Savings and Credit Associations: A Scoping Review,” *World Development Sustainability*, vol. 3, p. 100081, Dec. 2023, doi: 10.1016/J.WDS.2023.100081.
- [21] E. Lisnawati and A. Alhidayatullah, “Edukasi Literasi Keuangan Bagi Masyarakat di Kelurahan Baros Sukabumi,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia*, vol. 6, no. 3, pp. 23–28, Dec. 2023, doi: 10.36085/JPMBR.V6I3.5873.
- [22] I. Guérin, “Financial inclusion and gender in: Handbook of Microfinance, Financial Inclusion and Development.” Accessed: Dec. 15, 2025. [Online]. Available: <https://www.elgaronline.com/edcollchap/book/9781789903874/book-part-9781789903874-10.xml>
- [23] K. Goyal and S. Kumar, “Financial Literacy: A Systematic Review and Bibliometric Analysis,” *Int J Consum Stud*, vol. 45, no. 1, pp. 80–105, Jan. 2021, doi: 10.1111/IJCS.12605.
- [24] F. N. Ali, M. Panigoro, R. Koniyo, R. Hasiru, and F. Damiti, “Financial Literacy as a Determinant of Community Welfare: Empirical Evidence from a Rural Context,” *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, vol. 6, no. 2, pp. 174–183, Jun. 2025, doi: 10.62794/JE3S.V6I2.8017.
- [25] P. E. de Rozari, H. Jati, and R. F. Makatita, “Cultural Effect on Financial Literacy (Learn From Wulandoni Barter Market Trader in Lembata Regency),” *Journal of Social Science*, vol. 3, no. 3, pp. 567–575, May 2022, doi: 10.46799/JSS.V3I3.347.
- [26] H. Snyder, “Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines,” *J Bus Res*, vol. 104, pp. 333–339, Nov. 2019, doi: 10.1016/J.JBUSRES.2019.07.039.
- [27] J. W. Creswell, “Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan.” Accessed: Dec. 15, 2025. [Online]. Available: <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/213860/penelitian-kualitatif-dan-desain-riset-memilih-di-antara-lima-pendekatan>
- [28] World Bank, “Financial Inclusion.” Accessed: Dec. 15, 2025. [Online]. Available: <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion>
- [29] A. S. Rahayu, L. A. N. Hasanah, and L. S. Pratiwi, “The Role of Financial Literacy in Reducing Poverty: Experience from Indonesia,” *Dinamika Ekonomi*, vol. 12, no. 2, pp. 133–141, Mar. 2021, doi: 10.29313/DE.V12I2.7796.
- [30] M. C. Nogueira, L. Almeida, F. O. Tavares, M. C. Nogueira, L. Almeida, and F. O. Tavares, “Financial Literacy, Financial Knowledge, and Financial Behaviors in OECD Countries,” *Journal of Risk and Financial Management* 2025, Vol. 18, vol. 18, no. 3, Mar. 2025, doi: 10.3390/JRFM18030167.
- [31] M. Dunggio and Chusnah, “Financial Literacy and Inclusion in Indonesia During the Crisis: A Content Analysis Approach,” *Jurnal Economia*, vol. 21, no. 3, pp. 447–466, Oct. 2025, doi: 10.21831/ECONOMIA.V21I3.76161.

- [32] OJK, "OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024." Accessed: Feb. 25, 2025. [Online]. Available: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2024.aspx?utm_source=chatgpt.com
- [33] UNDP, "Human Development Report 2020," *Human Development Reports*, 2020.
- [34] F. A. Sihaloho, "Peran Literasi Keuangan dalam Mengatasi Perilaku Ekonomi Irrasional: Sebuah Tinjauan Literatur di Indonesia," *Journal of Economic Education and Entrepreneurship*, vol. 5, no. 2, pp. 1–14, Dec. 2024, doi: 10.31331/JEEE.V5I2.3661.
- [35] J. T. Curry, "Modeling the Dynamic Interplay Between Financial Literacy, Resilience, and Emotional Well-Being Across Diverse Demographics," *Cogent Economics and Finance*, vol. 13, no. 1, 2025, doi: 10.1080/23322039.2025.2544177.
- [36] J. Mustonen, G. Buturak, O. P. Ruuskanen, P. Kalmi, and S. Vaahtoniemi, "The Role of Financial Literacy in Payment Defaults," *Appl Econ*, Oct. 2025, doi: 10.1080/00036846.2025.2567013.
- [37] A. Molina-García, M. D. López-Subires, A. J. Cisneros-Ruiz, and J. Diéguez-Soto, "Bridging the Borders: Does Owner-Managers' Financial Literacy Facilitate Small Business Internationalization?," *Appl Econ Lett*, Aug. 2025, doi: 10.1080/13504851.2025.2536705.
- [38] M. Ahunov and L. Van Hove, "National Culture and Financial Literacy: International Evidence," *Appl Econ*, vol. 52, no. 21, pp. 2261–2279, May 2020, doi: 10.1080/00036846.2019.1688241.
- [39] N. Mahdiyah, "Studi Literatur Kebudayaan Kemiskinan pada Pengemis di Perkotaan," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, vol. 25, no. 1, pp. 46–54, Jun. 2023, doi: 10.26623/JDSB.V25I1.4020.
- [40] R. Sari, atus Solikah, and I. Artikel Abstrak, "Perempuan dan Budaya Kemiskinan Penerima Program Keluarga Harapan," *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, vol. 13, no. 1, pp. 71–84, Feb. 2024, doi: 10.21831/DIMENSIJA.V13I1.64425.
- [41] A. R. Zahrah and N. W. Prasodjo, "Kemiskinan Budaya pada Penduduk Berpendapatan Rendah (Kasus pada Komunitas Taru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat)," *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, vol. 7, no. 2, pp. 266–274, Dec. 2023, doi: 10.29244/JSKPM.V7I2.1235.
- [42] Sakaruddin, "Analisis Sosial Fenomena Kemiskinan: Perspektif Sosiologi," *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, vol. 4, no. 1, pp. 75–95, May 2021, Accessed: Dec. 15, 2025. [Online]. Available: <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jmks/article/view/28442>
- [43] S. Muljaningsih, M. Ekawaty, I. K. Anggraini, and A. K. Galuh, "Empowering Personal Financial Management Through Islamic Spirituality and Financial Independence (Freedom)," *Journal of International Conference Proceedings*, vol. 7, no. 5, pp. 991–1006, Feb. 2024, doi: 10.32535/JICP.V7I5.3783.
- [44] Safika and R. Mardikaningsih, "Pengaruh Kepercayaan dan Religiusitas terhadap Keputusan Sedekah Online," *Currency (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)*, vol. 3, no. 2, pp. 442–467, Jan. 2025, doi: 10.32806/CCY.V3I2.641.

- [45] A. A. Najib, "The Role of Islamic Financial Literacy in Strengthening Socio-Religious Resilience among Coastal Women," *Dirosatuna: Journal of Islamic Studies*, vol. 7, no. 1, pp. 78–98, Mar. 2024, doi: 10.31538/DIROSATUNA.V7I1.8853.
- [46] W. Wibowo, "Literasi Keuangan untuk Siswa: Efektivitas Buku Cerita Anak Bergambar dalam Edukasi Finansial di Sekolah Dasar," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS)*, vol. 5, no. 2, pp. 1585–1593, May 2025, doi: 10.37081/JIPDAS.V5I2.2900.
- [47] G. A. K. Surtiari, M. Wannewitz, P. Prasetyoputra, T. Hadumaon Siagian, and M. Garschagen, "Indonesia's Social Protection System: The Relevance of Informal Social Protection to Strengthen Adaptation to Climate Change," *Journal of Integrative Environmental Sciences*, vol. 21, no. 1, Dec. 2024, doi: 10.1080/1943815X.2024.2375995.
- [48] R. S. Muhamar, B. Rusli, N. Karlina, and C. Candradewini, "Subsidi LPG 3 Kg dalam Perspektif Sosiologi Kebijakan: Dampaknya terhadap Kesejahteraan dan Lingkungan di Jawa Barat," *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, vol. 4, no. 2, pp. 191–203, Aug. 2025, doi: 10.55123/SABANA.V4I2.5078.
- [49] J. R. Siedenburg, "Local Knowledge and Natural Resource Management in a Peasant Farming Community Facing Rapid Change: A Critical Examination," Apr. 2022, Accessed: Dec. 15, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/2204.04396>
- [50] D. Tan, "Demystifying the Proliferation of Online Peer-to-Peer Lending in Indonesia: Decoding Fintech as a Regulatory Challenge," *Asian Journal of Law and Society*, vol. 10, no. 3, pp. 376–400, 2023, doi: 10.1017/ALS.2022.21.